

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS BANK SAMPAH DI KECAMATAN KADIA KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Oleh

Aan Amustryatma¹,
I Nyoman Sumaryadi², Kusworo³

¹⁾ Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo Papua

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
aan_amustryatma@yahoo.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

In 2015, Kadia Subdistrict had waste bank at five village, that is Anaiwoi Village, Bande Village, Kadia Village, Pondambea Village, and Wowawanggu Village. In 2016, waste bank program at Anaiwoi Village, Kadia Village, Pondambea Village and Wowawanggu Village had stop. But that is had work at Bande Village and still doing sorting and handling the waste. The waste bank that ready in 2015 at Kadia Subdistrict, only at Bande Village that had work.

The theory used in this study is waste bank management theory that proposed by Iqbal and Nurul, that is planning aspect, institutional aspect, operational aspect, financing aspect, regulation aspect and strategy theory used ASOCA analysis. This study used qualitative methode and descriptive approach. And data collection techniques used observation, interview and other supporting document.

The result of this study is waste bank based waste management policy in Kadia Subdistrict Southeast Sulawesi Province has ineffective. Because of the five Village in Kadia Subdistrict, only one still work the policy of the waste bank. Inhibiting factors and supporting factors for the effectiveness of waste bank management policy to solving waste problem in Kadia District, Kendari City is communication, resource, disposition and bureaucratic structure. The strategy carried out by Kendari City Government in improving the effectiveness of Kendari City waste bank management policies, is carry out education and training in waste management, provide management and organizational training to waste bank managers, develop waste bank service management, enhance the participation of the Dinas Lingkungan Hidup in developing waste banks, improving the understanding of waste bank managers regarding the sorting of waste and types of waste, this can be done through a comparative study, improve the ability of waste bank managers to read the market conditions of organic waste, sanctioning people who dispose of litter, and providing a landfill with a selection method in the community.

Keywords: Kadia Village, waste bank, strategy

ABSTRAK

Kecamatan Kadia pada 2015 memiliki Bank Sampah di 5 (lima) kelurahan di antaranya Kelurahan Anaiwoi, Bende, Kadia, Pondambea, Wowawanggu. Program Bank Sampah yang telah ada pada 2016 pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Anaiwoi, Kadia, Pondambea, dan

Wowawanggu berhenti dan pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Bende masih berjalan melaksanakan pemilahan dan penanganan sampah. Bank Sampah yang telah berjalan pada 2015 di Kecamatan Kadia, hanya bank sampah di Kelurahan Bende yang masih beroperasi.

Teori yang digunakan adalah teori pengelolaan sampah yang dikemukakan oleh Iqbal dan Nurul yaitu aspek perencanaan, kelembagaan, operasional, pembiayaan, peraturan dan teori strategi menggunakan analisis ASOCA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, serta mengumpulkan dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa kebijakan sistem pengelolaan sampah berbasis bank sampah di Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tidak efektif, di mana dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Kadia, hanya satu kelurahan yang mampu menjalankan kebijakan bank sampah tersebut, yaitu Kelurahan Bende. Faktor yang menghambat dan mendukung efektivitas kebijakan pengelolaan bank sampah dalam mengatasi masalah sampah di Kecamatan Kadia Kota Kendari, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Birokrasi.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan bank sampah Kota Kendari, yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen pengelolaan sampah, memberikan pelatihan manajemen dan organisasi kepada pengelola bank sampah, mengembangkan manajemen pelayanan Bank Sampah, meningkatkan peran serta Dinas Lingkungan Hidup dalam mengembangkan Bank sampah, meningkatkan pemahaman pengelola bank sampah mengenai pemilahan sampah dan jenis-jenis sampah hal ini dapat dilakukan dengan studi banding, meningkatkan kemampuan pengelola bank sampah dalam membaca kondisi pasar sampah organik, memberikan sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan menyediakan tempat pembuangan sampah dengan metode pemilahan di lingkungan masyarakat.

Kata kunci: Kecamatan Kadia, bank sampah, strategi

PENDAHULUAN

Sampah memiliki beberapa dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, seperti membuat lingkungan menjadi kotor, terlihat kumuh, menjadi sumber penyakit, menyebabkan bencana, dan sebagainya. Di samping itu, penambahan jumlah sampah diperparah dengan pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan prosedur. Pengelolaan sampah dalam skala kecil oleh masyarakat umumnya dilakukan dengan cara dibakar dan dalam skala besar dilakukan dengan meletakkan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ataupun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Permasalahan sampah juga terkait dengan minimnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengolah sampah. Hal ini dikarenakan paradigma masyarakat yang masih menganggap

bahwa sampah adalah bahan sisa yang tidak memiliki nilai guna dan manfaat.

Pemerintah Kota Kendari mendorong upaya pembentukan bank sampah minimal ada bank sampah di satu kelurahan yang dikelola oleh warga masyarakat. Bank sampah dapat berperan sebagai *dropping point* bagi produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai, sehingga sebagian tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah juga menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Dengan menerapkan pola ini diharapkan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berkurang. Penerapan prinsip 3R *Reduce, Reuse, Recycle* sedekat mungkin dengan sumber sampah juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga tujuan akhir kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia dapat

dilaksanakan dengan baik. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012).

Bank sampah sudah digalakkan pemerintah Kota Kendari sejak tahun 2015, hanya saja metode pengelolaan modern tersebut tidak begitu diminati oleh masyarakat. Sedangkan pemerintahan sudah melakukan berbagai upaya melalui dinas kebersihan, akan tetapi program tersebut tidak dimaksimalkan oleh masyarakat. Seperti dijelaskan oleh Moh. Nur Rasak, Bank sampah yang disediakan di setiap kecamatan pasif, "Animo warga hanya saat pertama diluncurkan saja. Setelah itu seperti tidak ada lagi sampah, padahal sampah di penampungan yang masuk itu ratusan ton tiap hari." (*Kendari Pos*, 2018).

Volume timbunan sampah di Kota Kendari pada 2017 mencapai 4.057,28 m³/hari, dengan komposisi sampah yang ditimbulkan di Kota Kendari, sebesar 82,19% merupakan sampah organik dan sisanya yaitu 17,81% merupakan sampah anorganik seperti plastik, besi, alumunium, karet dan kaca. Sampah yang ditimbulkan umumnya merupakan sampah rumah tangga, sebesar 1.847,47 m³/hari atau 45,53% dari total timbunan sampah Kota Kendari. Volume timbunan sampah yang dapat terangkut ke TPA sebesar 3.642,56 m³/hari atau 89,78% dari total timbunan sampah, sedangkan sisanya 414,72 m³/hari atau 10,22% dikelola sendiri oleh masyarakat, dibakar, atau dibuang secara sembarangan (dibuang ke sungai ataupun ke lahan kosong). Pengelolaan sampah di Kota Kendari masih menerapkan pola konvensional yaitu kumpul, angkut, buang, belum ada proses pemilahan dan pemprosesan sampah (Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, 2018).

Selain masalah volume sampah yang terus meningkat, Pemerintah Kota Kendari saat ini juga menghadapi berbagai persoalan terkait penanganan sampah, berupa keterbatasan biaya operasional dan sarana prasarana pengelolaannya. Besarnya

anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari untuk menangani sampah pada 2011 sebesar Rp2.683.950.000. Meningkat rata-rata 11,25 % per tahun, sehingga pada 2017 biaya yang dikeluarkan pemerintah Kota Kendari sebesar Rp5.073.069.000. Dari anggaran tersebut jumlah sampah yang tertangani baru mencapai 85% dari total sampah yang dihasilkan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, 2018).

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat mengikuti bank sampah di Kecamatan Kadia.
- b. Bank sampah sulit diterima dan berkembang di perumahan menengah ke atas.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan bank sampah.
- d. Peran serta pemerintah dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis bank sampah yang belum optimal serta belum menyeluruh.
- e. Masih minimnya sarana prasarana yang menunjang dari pemerintah dalam penanganan sampah.

MASALAH PENELITIAN

Berpjik dari persoalan yang ada mengenai kinerja para pegawainya, maka mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang kinerja pegawai yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas kebijakan pengelolaan bank sampah dalam mengatasi masalah sampah di Kecamatan Kadia Kota Kendari?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kebijakan pengelolaan bank sampah dalam

- mengatasi masalah sampah di Kecamatan Kadia Kota Kendari?
3. Strategi apa yang dilakukan pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan bank sampah Kota Kendari?

TINJAUAN PUSATAKA

Menurut Nyoman (2005: 105) efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Robbins dalam Tika P. (2008: 129) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Lubis dan Huseini (2009: 98) efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena menggambarkan keseluruhan usaha organisasi dalam mencapai sasarannya.

The Liang Gie (1998: 147) mengemukakan definisi bahwa "efektivitas yaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek/ akibat yang dikehendaki". Stoner (Kurniawan, 2005: 106) menekankan pentingnya efektivitas dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Menurut Mullins dalam Rukman (2006: 14), efektif itu harus terkait dengan pencapaian tujuan

dan sasaran suatu tugas dan pekerjaan dan terkait juga dengan kinerja dari proses pelaksanaan suatu pekerjaan.

Implementasi merupakan penerapan suatu kebijakan yang berbentuk aturan yang memaksa dan mengikat yang dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan aturan-aturan teknis lainnya, sedangkan untuk lingkup pemerintah daerah kabupaten berupa peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan aturan teknis lainnya.

Menurut Dunn (2003: 24) implementasi kebijakan adalah "kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia". Selanjutnya menurut Luankali (2007: 34) implementasi kebijakan adalah: "Pelaksanaan semua kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan publik, diharapkan harus lebih cermat dan teliti, agar segala penyimpangan dapat terdeteksi sedini mungkin". Luankali (2007: 35) berpendapat bahwa pada saat implementasi kebijakan, maka perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan yang diperlukan untuk:

1. Membantu pelaksana kebijakan dalam melakukan penilaian tingkat kepatuhan masyarakat.
2. Menemukan akibat sementara yang terjadi.
3. Mengidentifikasi hambatan dan rintangan yang terjadi.
4. Menemukan kinerja pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Grindle dalam Syafri (2010: 30) menyatakan bahwa: "*Implementability* suatu kebijakan, sangat ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*)". Banyak model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh para pakar, dan model pendekatan

tersebut dapat memengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Peter de Leon dan Linda de Leon dalam Nugroho (2009: 437) mengelompokkan model implementasi menjadi tiga generasi yaitu "Pertama, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya; kedua, pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah (*top-downer perspective*); ketiga, perilaku aktor pelaksana lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan." Generasi pertama yaitu pada 1970an, generasi kedua pada 1980an dan generasi ketiga pada 1990-an.

Menurut Iqbal dan Nurul (2009: 277) menjelaskan:

Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan: penyimpanan (sementara, pengumpulan, pemindahan, atau pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah) dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat seperti teknik (*engineering*), perlindungan alam (*conservation*), keindahan dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya serta mempertimbangkan sikap masyarakat.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan serta memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah pada dasarnya ingin menangani atau mengubah sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan kemanfaatan serta mengubahnya menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Upaya yang dilakukan menurut Iqbal dan Nurul (2009: 349) untuk menangani permasalahan sampah seharusnya dimulai dari sumber sampah tersebut yaitu dengan penerapan prinsip 4R di antaranya mengganti (*replace*), mengurangi (*reduce*), mendaur ulang (*recycling*), dan memakai kembali (*reuse*).

Aspek-aspek pengelolaan sampah menurut Iqbal dan Nurul (2009: 349) yaitu sebagai berikut.

1. Aspek Teknis Operasional

Aspek operasional dapat dibagi menjadi enam elemen fungsi yaitu aspek, penimbunan, penanganan yang terdiri dari pemisahan, penyimpanan dan processing di tempat, pengumpulan, dan pemindahan, dan pemisahan, *processing*, dan pemrosesan akhir.

2. Aspek Kelembagaan

Beberapa kondisi yang ada yang berkaitan dengan aspek kelembagaan atau institusi adalah sebagai berikut.

- Sebagian besar institusi pengelolaan adalah berbentuk dinas, suku dinas, seksi, sub seksi, di mana belum ada pemisahan antara operator dan regulator.
- Struktur organisasi yang belum ditunjang dengan kapasitas.
- Tata laksana yang belum jelas antara administrasi dan tata laksana teknis.
- Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara instansi terkait di lapangan

3. Aspek Pembiayaan

Beberapa kondisi yang ada berkaitan dengan aspek pembiayaan di antaranya:

- Keterbatasan pembiayaan termasuk sumber pendanaan dan investasi, operasional/pemeliharaan mengakibatkan pengelolaan sampah tidak optimal.

- b. Belum terciptanya iklim yang kondusif untuk kerja sama dengan swasta.
 - c. Tarif retribusi sampah belum didasarkan pada perhitungan dan pendataan yang memadai dan penarikan retribusi masih rendah.
4. Aspek peraturan

Berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah sampai dengan Standar Nasional Indonesia sudah dikeluarkan termasuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan demikian pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat secara efektif dan efisien.

5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat yang diharapkan dalam pengelolaan sampah di antaranya:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui antara lain kampanye, sosialisasi, dan edukasi bidang persampahan.
- b. Menyosialisasikan dan menyebarluaskan NPSK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
- c. Perlu dibentuk forum komunikasi sebagai media antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi (Pasal 1 Permen LH No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah).

Menurut Bambang Wintoko (2013: 64) visi Bank Sampah yaitu menjadi jaringan UKM lingkungan yang menghijaukan Indonesia 2020 dan menjadikan Negara Indonesia menjadi Negara yang sehat tahun 2020.

Misi Bank Sampah adalah sebagai berikut.

1. Mengelola sampah hingga memiliki nilai ekonomi tinggi.
2. Mendayagunakan sampah menjadi barang bermanfaat sehingga mempunyai nilai ekonomi dan potensi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah secara benar dan ramah lingkungan.
4. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
5. Menciptakan lapangan pekerjaan.
6. Membudayakan ekonomi kerakyatan.

Tujuan dibentuknya Bank Sampah adalah mendidik dan membudayakan pengurangan sampah di tingkat masyarakat sekaligus mengambil manfaat ekonomi dari pelaksanaannya. Bank Sampah terdiri atas tiga komponen:

1. Penabung, yaitu masyarakat/lembaga/institusi penghasil sampah.
2. Pengelola, yaitu petugas yang melayani tabungan sampah (direktur, wakil direktur, teller, customer service) yang berasal dari masyarakat.
3. Pembeli sampah/rosok/pengepul yaitu perseorangan/lembaga yang menjadi mitra Bank Sampah dalam mengelola sampah.

Bank Sampah merupakan solusi alternatif dalam pengelolaan sampah yang di antaranya:

1. Rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah.
2. Solusi inovatif untuk memaksa masyarakat memilah sampah.

3. Mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap sampah.
4. Menumbuhkan potensi ekonomi kerakyatan.
5. Memberi kesempatan kerja.
6. Investasi.

METODE PENELITIAN

Permasalahan yang akan dikaji memerlukan cara penyelesaiannya, hal ini dilakukan untuk memenuhi kaidah penelitian ilmiah. Menurut Kerlinger (2006: 17) menyatakan bahwa, "Penelitian ilmiah adalah penyelidikan secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis, tentang fenomena-fenomena alami, dengan dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat antara fenomena-fenomena itu." Selanjutnya menurut Mayer dan Greenwood (1984: 80) bahwa, "... teknik penelitian merupakan manipulasi spesifik dan mental yang dipergunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan atau memproses data yang ditentukan oleh rencana penyelidikan."

Hasil maksimal dapat memperoleh, maka diperlukan desain penelitian yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai pula dengan objek yang akan diteliti. Kirk dan Miller (1986), mendefinisikan "metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya". Sedangkan menurut Kerlinger (2006: 484) menyatakan bahwa, "Desain Penelitian mempunyai dua maksud atau kegunaan mendasar: (1) menyediakan jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan (2) mengontrol atau mengendalikan varian". Selanjutnya dijelaskan bahwa, "Desain membantu peneliti mendapatkan jawab untuk pertanyaan penelitian dengan dan juga membantu peneliti mengontrol varian-

varian eksperimental, varian ekstra dan varian galat pada suatu masalah penelitian tertentu yang sedang dikaji."

Miles dan Hubermann (1994) menjelaskan bahwa "metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah".

Menurut Bodgan dan Taylor dalam Basrowi (2008: 1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah dalam Mengatasi Masalah Sampah di Kecamatan Kadia Kota Kendari

Aspek perencanaan dapat disimpulkan bahwa aspek perencanaan termasuk dalam penilaian yang cukup baik, di mana sosialisasi mengenai kebijakan bank sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari sudah optimal, namun edukasi mengenai pengelolaan bank sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari belum optimal.

Perencanaan partisipatif merupakan wujud nyata dari perubahan paradigma perencanaan sentralistik ke dalam perencanaan partisipatif. Peran aktif masyarakat dan stakeholders dalam pengelolaan bank sampah merupakan

wujud dari partisipatif masyarakat, sebagai bentuk dari tuntutan masyarakat tentang partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Inti dasar dalam perencanaan partisipatif adalah adanya jaminan dan hak warga dari usulan pengelolaan bank sampah.

Posisi pemerintah merupakan partner masyarakat dalam bentuk hubungan kolaborasi. Pemerintah merupakan bagian dari aktor luar yang bersifat eksternal terhadap komunitas dengan perannya sebagai pihak yang menyediakan sistem pendukung bagi program ini dalam bentuk pendanaan awal untuk pengadaan sarana prasarana maupun tenaga pendamping untuk konsultasi teknis. Namun bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan aktivitas bank sampah yang dijalankan oleh komunitas ini tidak bersifat permanen. Bantuan finansial ini bersifat stimulan untuk memulai program ini dan hanya diberikan dalam rangka penyediaan infrastruktur, bukan untuk dana operasional pengelolaan sampah.

Masyarakat Kecamatan Kadia merupakan aktor utama yang banyak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini memberikan makna bahwa masyarakat Kecamatan Kadia merupakan subjek dari program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Peran aktif masyarakat terlihat mulai dari tahap perencanaan, desain operasional, operasionalisasi kegiatan sampai kepada pengawasan kegiatan.

Aspek kelembagaan dapat disimpulkan bahwa aspek kelembagaan termasuk dalam penilaian yang cukup baik, di mana bentuk organisasi Bank Sampah Kelurahan Bende tersebut menggambarkan bahwa organisasi ini berusaha untuk menjalankan tindakan bersama-sama secara tersistemasi dan terorganisir, mekanisme kerja mereka berkaitan dengan aktivitas merealisasikan keberadaan Bank Sampah Kelurahan Bende ke dalam tindakan nyata di masyarakat, rekrutmen dan pergantian

kader penggerak dilakukan oleh pihak RT dan bukan Ketua Bank Sampah Kelurahan Bende, dan proses pengambilan keputusan berusaha untuk dilakukan dengan benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga dapat menunjukkan sebuah proses dan program pengelolaan sampah yang aspiratif, partisipatif serta memiliki akar dan legitimasi yang kuat di tingkat masyarakat.

Secara kelembagaan, Bank Sampah Kelurahan Bende merupakan lembaga masyarakat yang berdiri atas inisiatif dua pihak, yakni masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merupakan kader lingkungan, ibu-ibu PKK mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan sampah, sedangkan pemerintah (dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari) turut menginisiasi pendirian Bank Sampah Kelurahan Bende, mengingat tupoksinya sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Kendari.

Aspek operasional dapat disimpulkan bahwa aspek operasional termasuk dalam penilaian yang cukup baik, di mana masyarakat Kelurahan Bende mampu melaksanakan pemilahan sampah dengan baik, pengumpulan dan pengangkutan sampah telah berjalan dengan baik, gudang penyimpanan sampah pada Bank Sampah Kelurahan Bende sudah baik dan dikelola dengan semaksimal mungkin, hal tersebut dilihat dari gudang tersebut tidak berbau dan disediakannya bak sampah terpilah agar sampah tertata rapi dan terpilah sesuai jenisnya, yaitu jenis logam, jenis kertas, plastik, dan kaca sehingga gudang terlihat terlihat rapi dan tidak kotor, volume sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Kelurahan Bende cukup baik, dan potensi ekonomi sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Kelurahan Bende sangat potensial.

Sesuai dengan namanya, konsep pengelolaan yang dipakai oleh Bank Sampah Kelurahan Bende mengadopsi sistem yang dipakai oleh bank-bank konvensional. Ada kegiatan menabung walau objek

yang ditabungkan berbeda, di mana objek yang ditabung adalah sampah-sampah kering anorganik yang dihargai dari yang termurah sampai yang termahal. Untuk lebih mengetahui secara rinci mekanisme operasional dari Bank Sampah Kelurahan Bende, berikut akan diuraikan:

1. Bank sampah melakukan penerimaan sampah anorganik yang dikumpulkan nasabah lalu sampah anorganik tersebut ditabung di bank sampah untuk dikelola.
2. Setiap nasabah yang datang dan menabung di bank sampah akan diberikan buku tabungan.
3. Selanjutnya sampah anorganik yang sebelumnya sudah dipilah oleh nasabah akan ditimbang oleh petugas bank sampah.

Kemudian jenis dan berat timbangan akan dicatat di buku tabungan dan di buku catatan petugas sebagai barang masuk beserta jumlah nominal rupiah dari sampah yang sudah ditimbang.

Aspek pembiayaan termasuk dalam penilaian yang baik, di mana sebagai investasi awal Pemerintahan Kelurahan Bende memberikan bantuan senilai Rp22.800.000 sebagai modal awal, sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota kendari memberikan peralatan pemilahan sampah berupa tong sampah organik, tempat sampah campursari, kantong sampah anorganik, kapstok dan saringan/ayakan. Pemerintahan Kelurahan Bende juga memberikan bangunan gudang yang tidak digunakan, untuk digunakan oleh Bank Sampah Kelurahan Bende sebagai bangunan operasionalnya. Bank Sampah Kelurahan Bende menggunakan investasi yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan Bende sebagai biaya operasional bank sampah, biaya operasional ini digunakan untuk upah tenaga penggerobak, pembelian sampah anorganik dari masyarakat, pembelian *stardex*, pembelian sekam, biaya rapat koordinasi, dll. Retribusi yang dipungut

oleh Bank Sampah Kelurahan Bende masih cukup murah, yaitu sebesar Rp3.000/KK/bulan, di mana Rp1.500 disetorkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sisanya dimanfaatkan oleh Bank Sampah Kelurahan Bende sebagai biaya operasional.

Aspek peraturan termasuk dalam penilaian yang cukup baik, di mana norma yang terkandung adanya keinginan yang besar dari Pemerintah Kota Kendari untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan 3R, pemerintah Kota Kendari dapat melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan bank sampah. Standar yang terkandung melaksanakan kegiatan 3R dan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Prosedur yang terkandung adanya prosedur penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Adanya pengaturan bank sampah dan adanya pengaturan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota kendari. Kriteria yang terkandung yaitu adanya pengaturan hak, kewajiban, pembiayaan, larangan dan sanksi hukum.

Berdasarkan uraian dari aspek perencanaan, kelembagaan, operasional, pembiayaan, dan peraturan dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem pengelolaan sampah berbasis bank sampah Di Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tidak efektif, di mana dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Kadia, hanya satu kelurahan yang mampu menjalankan kebijakan bank sampah tersebut, yaitu Kelurahan Bende.

Faktor Pendukung dan Menghambat

Faktor pendukung efektivitas kebijakan pengelolaan bank sampah dalam mengatasi masalah sampah di Kecamatan Kadia Kota Kendari adalah sebagai berikut.

- 1) Keterlibatan anggota masyarakat

Dengan adanya beberapa masyarakat

sekitar yang berpartisipasi penuh dan bersedia terlibat menjadi anggota untuk menjalankan program kegiatan dalam hal pembangunan yang telah ditentukan oleh Kota Kendari, secara nyata dapat membantu proses berjalannya program untuk dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pemerintah Kota Kendari.

2) Sarana dan Prasarana

Dalam suatu program sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam proses berjalannya suatu program tersebut. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang telah difasilitasi oleh pemerintah dalam proses pelaksanaan Bank Sampah "Kelurahan Bende" sebagai tempat pengelolaan sampah rumah tangga diharapkan akan dapat berjalan dengan lancar dan maksimal secara berkesinambungan.

3) Kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari

Kerja sama yang telah dilakukan dengan pihak Pemerintah Kota Kediri khususnya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari merupakan salah satu bentuk sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Adanya kerja sama ini mempermudah Bank Sampah "Kelurahan Bende" dalam menjalankan program yang telah diberikan untuknya. telah dikemukakan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari No. 4 Tahun 2015 yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan persampahan, pembersihan saluran.

4) Manfaat

Manfaat Lingkungan, motivasi untuk memperbaiki lingkungan di sekitar mereka juga turut mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan

Bank Sampah Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Dengan kegiatan pengumpulan sampah untuk ditabung ini, nasabah berharap dapat memperbaiki keadaan lingkungan mereka yang kotor, banyak sampah dan rawan banjir. Hingga kini sudah sulit menemukan sampah berserakan di sekitar tempat tinggal nasabah, khususnya sampah yang bernilai ekonomi seperti plastik, kardus dan botol kaca.

ADapun faktor menghambat efektivitas kebijakan pengelolaan bank sampah dalam mengatasi masalah sampah di Kecamatan Kadia Kota Kendari adalah sebagai berikut.

1) Keterbatasan Alat Pengolahan Sampah

Peralatan pengakut sampah yang sering rusak membuat sirkulasi penjualan sampah ke pihak pengepul terkadang terganggu. Jika ini terjadi maka sampah akan menumpuk di Bank Sampah dan tidak bisa dijual. Jika sampah belum dijual ke pihak pengepul maka tidak akan ada pemasukan uang yang diterima oleh Bank Sampah. Sedangkan Di sisi lain nasabah terus saja menabung dan menarik hasil tabungannya. Ini yang terkadang membuat para pengurus Bank Sampah harus ikut membiayai kas Bank Sampah yang terkadang sering minus akibat lambatnya sirkulasi penjualan sampah ke pihak pengepul. Kendala-kendala seperti ini yang sering dihadapi oleh para pengurus Bank Sampah.

2) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran ini juga membuat pengurus Bank Sampah Kelurahan Bende kesulitan untuk mengadakan pelatihan masal terhadap nasabah-nasabah mereka. Sebab untuk bisa mendatangkan para nasabah mereka harus memberikan semacam uang saku sebagai pengganti dari penghasilan pekerjaan nasabah yang terganggu akibat pelaksanaan pelatihan tersebut. Karena

beberapa nasabah yang merupakan ibu rumah tangga juga memiliki pekerjaan sampingan seperti menjadi buruh cuci, nelayan kecil atau pemilah ikan di jermal-jermal, sehingga apabila mereka meninggalkan pekerjaan mereka maka sumber pendapatan harian tidak akan dapat. Oleh karenanya, alternatif yang dilakukan adalah dengan memberikan uang saku kepada mereka agar mau hadir dalam pelatihan tersebut.

3) Ketidaksiapan Anggota Masyarakat

Hambatan dalam suatu organisasi dalam menjalankan peran dan tugasnya juga berasal dari dalam suatu organisasi tersebut, tetapi setiap hambatan akan dapat dihilangkan seminimal mungkin apabila suatu organisasi menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati. Ketidaksiapan yang ada merupakan kendala dari dalam organisasi tersebut yaitu dalam hal pengambilan sampah rumah tangga sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan baik dalam pengambilan dari rumah-rumah masyarakat, sekolah-sekolah maupun pertokoan karena pegawai yang bertugas mengambil sampah pada rumah-rumah, sekolah-sekolah maupun pertokoan tersebut tidak hanya bekerja di Bank Sampah ini melainkan juga bekerja di luar Bank Sampah ini.

4) Ketidakdisiplinan Masyarakat dalam Simpan Pinjam

Program pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Bank Sampah Kelurahan Bende ini akan mendapatkan kendala apabila masyarakat tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Bank Sampah Kelurahan Bende dalam hal simpan pinjam. Masyarakat yang telah menjadi nasabah di Bank Sampah Kelurahan Bende tersebut telah menyalahgunakan apa yang didapat dalam proses simpan

pinjam. Masyarakat tidak membayar cicilan sesuai dengan ketentuan hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Bank Sampah Kelurahan Bende.

Strategi yang Dilakukan

Berdasarkan hasil dari analisis ASOCA, prioritas strategi yang dilakukan pemerintah kota kendari dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan Bank Sampah Kota Kendari adalah sebagai berikut

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen pengelolaan sampah.
2. Memberikan pelatihan manajemen dan organisasi kepada pengelola bank sampah
3. Meningkatkan peran serta Dinas Lingkungan Hidup dalam mengembangkan Bank sampah.
4. Mengembangkan manajemen pelayanan Bank Sampah
5. Meningkatkan kemampuan pengelola bank sampah dalam membaca kondisi pasar sampah organik
6. Memberikan sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
7. Menyediakan tempat pembuangan sampah dengan metode pemilahan di lingkungan masyarakat.
8. Meningkatkan pemahaman pengelola bank sampah mengenai pemilahan sampah dan jenis-jenis sampah hal ini dapat dilakukan dengan studi banding.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu maka penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Kebijakan sistem pengelolaan sampah berbasis bank sampah di Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tidak efektif, di mana dari lima

- kelurahan yang ada di Kecamatan Kadia, hanya satu kelurahan yang mampu menjalankan kebijakan bank sampah tersebut, yaitu Kelurahan Bende.
2. Faktor yang mendukung efektivitas kebijakan pengelolaan bank sampah dalam mengatasi masalah sampah di Kecamatan Kadia Kota Kendari berdasarkan fakta empiris dan temuan lapangan, yaitu keterlibatan anggota masyarakat, sarana dan prasarana, Kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari, dan manfaat. Sedangkan faktor yang menghambat, yaitu keterbatasan peralatan pengolahan sampah, keterbatasan anggaran, ketidaksiapan anggota masyarakat, ketidakdisiplinan masyarakat dalam simpan pinjam.
 3. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan bank sampah Kota Kendari berdasarkan hasil analisis ASOCA, yaitu
 - a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen pengelolaan sampah.
 - b. Memberikan pelatihan manajemen dan organisasi kepada pengelola bank sampah
 - c. Meningkatkan peran serta Dinas Lingkungan Hidup dalam mengembangkan Bank Sampah.
 - d. Mengembangkan manajemen pelayanan Bank Sampah
 - e. Meningkatkan kemampuan pengelola bank sampah dalam membaca kondisi pasar sampah organik
 - f. Memberikan sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
 - g. Menyediakan tempat pembuangan sampah dengan metode pemilahan di lingkungan masyarakat.
 - h. Meningkatkan pemahaman pengelola bank sampah mengenai pemilahan sampah dan jenis-jenis sampah hal ini dapat dilakukan dengan studi banding.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis juga mengemukakan saran sebagai berikut.

1. Dalam hal sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah bisa dengan memasang baliho ataupun poster mengenai kesadaran akan kebersihan lingkungan di tempat-tempat umum, dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat bisa lebih sering dilakukan dan sosialisasi melalui media elektronik seperti di televisi dan radio agar implementasi pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
2. Perlu adanya penambahan petugas kebersihan di lapangan dan penambahan peralatan kebersihan dan kendaraan berat, karena saat ini kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari tidak semua dalam kondisi yang baik atau rusak.
3. Meningkatkan komitmen petugas kebersihan dan aparat pemerintah dengan cara memberikan motivasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk menjalankan tugasnya dengan optimal ketika bekerja.
4. Perlu adanya penambahan bagian-bagian khusus dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah serta adanya bagian atau tim khusus yang menangani masyarakat yang melanggar saat membuang sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.

- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations. Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Basrowi, Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Prenada Media Group, Jakarta.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication Inc,
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Handayaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Ilmu Administrasi Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Iqbal, Mubarak Wahid dan Nurul Chayatin, 2009. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Medika.
- Jones, Charles O. 2000. *Pengantar Kebijakan Publik. (Public Policy) Diterjemahkan oleh Ricky Ismanto*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kadji, Yulianto. 2008. "Implementasi Kebijakan Publik melalui MSN Approach". *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika* . Volume 6 Edisi Khusus Juli 2008. Malang: Universitas Merdeka Malang.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kirk, Jerome, dan Marck L. Miller, 1986. *Reliability and Validity Qualitative Research, Qualitative Research Methods*. Series 1, A Sage University Paper.
- Kertapraja, E Koswara, 2012, *Pemerintahan Daerah: Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi*, INNER, Jakarta.
- Kriyantono, Rahmat, 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group.
- Luankali, Bernadus, 2007, *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Amalia Press.
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 2009. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat antar-Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Marbun, B.N. 2005. *Otonomi Daerah 1945-2005: Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mayer, Robert R & Ernest Greenwood, 1984. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- Miles, M.B dan Hubermann . 1994. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi, UI Press: Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Narbuko dan Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2011. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Riant Nugroho. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*. Jakarta: Granit.
- Rasyid, Ryass, 2002, *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*, PT Mutiara Sumber Widya: Jakarta.
- Satori. Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Sumantri A. 2010. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2006. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- , 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suradinata, Ermaya. 2013. *Analisis Kepemimpinan: Strategi Pengambilan Keputusan*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Syaafri, Wirman dan Israwan Setyoko. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor
- Syafrudin, 2004, *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang)*, Makalah pada Diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP.
- Tika, H Pabundu. 2008. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tjahya Supriatna, 2009. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin, Abdul, 2010. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawa, Samodra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wintoko, Bambang, 2013. *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemapanan Finansial*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah